

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN,
PEMANFAATAN INFORMASI TEKNOLOGI DAN KETAATAN
PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
(STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:

SUTRISNO
NIM: 10673004931

**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN INFORMASI TEKNOLOGI DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

Oleh : SUTRISNO

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini sesuai dengan salah satu prinsip yang telah diatur berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah haruslah jujur, objektif, transparan dan akurat yang berarti instansi pemerintah harus juga akuntabel dan taat atas kinerjanya terhadap publik. Juga menurut Chin dan Todd bahwa salah satu manfaat teknologi informasi adalah meningkatkan kinerja organisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan survey. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan 38 pembuat LAKIP yang berada pada SKPD di Kota Pekanbaru, pengolahan dan penganalisaan data menggunakan uji asumsi klasik setelah sebelumnya dilakukan uji validitas dan reabilitas, kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan uji statistic regresi berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis satu dan tiga diterima, sedangkan untuk hipotesis kedua ditolak. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 0,002 dan 0,02. Sedangkan untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk koefisien determinasi sendiri sebesar 68,3%, yang berarti variabel penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dapat menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 68,3% dan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi
Teknologi, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Akuntabilitas Keuangan	13
B. Pemanfaatan Teknologi Informasi	15
C. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	16
D. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19
E. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22
F. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23
G. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas	

Kinerja Instansi Pemerintah	24
H. Kerangka Teoritis, Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis ...	25
1. Kerangka Teoritis.....	25
2. Model Penelitian	26
3. Pengembangan Hipotesis	27
a. Hubungan Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap AKIP	27
b. Hubungan Pemanfaatan Informasi Teknologi terhadap AKIP	27
c. Hubungan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap AKIP	28

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data	29
B. Teknik Pengumpulan Data	29
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	30
D. Pengukuran Variabel	32
1. Akuntabilitas Keuangan	32
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	33
3. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	33
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Operasional Variabel	37
G. Pengujian Data	40
1. Uji Validitas	40
2. Uji Reliabilitas Data.....	41
H. Analisis Data	41
Pengujian Asumsi Klasik	42
A. Uji Normalitas	42
B. Uji Multikolinearitas	43
C. Uji Auto Korelasi	44
D. Uji Heteroskedastisitas	45

I. Pengujian Hipotesis	45
Uji Determinasi	47

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Pengembalian Kuesioner.....	48
2. Karakteristik Responden	49
3. Statistik Deskriptif Variabel.....	50
B. Hasil Pengujian Data	52
1. Hasil Pengujian Validitas.....	51
A. Validitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan	52
B. Validitas Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi	53
C. Validitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan.....	54
D. Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...	54
2. Hasil Pengujian Reabilitas	55
A. Reabilitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan.....	56
B. Reabilitas Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi.....	56
C. Reabilitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan.....	56
D. Reabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .	57
C. Pembahasan dan Hasil Pengujian Hipotesis	58
1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	57
A. Hasil Pengujian Normalitas Data	57
B. Hasil Pengujian Multikolinearitas	58
C. Hasil Pengujian Auto Korelasi	59
D. Hasil Pengujian Heterokedastisitas	60
2. Hasil Pengujian Hipotesis	61
A. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	63
B. Pengaruh Pemanfaatan Informasi Teknologi terhadap	

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65
C. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	67
3. Koefisien Determinasi.....	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan	71
C. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam wacana *good governance* atau Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini. Untuk mencapai *good governance* itu sendiri, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peratyrn perundang-undangan pun telah bergulir, demikian pula pemerintah dan seluruh elemen bangsa secara sistematis dan berkelanjutan telah mengambil berbagai kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan terselenggaranya pemerintahan yang baik tersebut.

Salah satunya adalah Intruksi Presiden No. 7 tahun 2001 tanggal 15 Juni 2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkanpraktek *good governance* khususnya akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab. Demikian pula dalam peraturan perundangan misalnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 dan berbagai peraturan perundangan pelaksanaannya yang telah mencoba menerapkan iklim pemerintah yang baik khususnya praktek akuntabilitas.

Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). LAN dan BPKP, 2000:28 dalam Jannah (2008) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, dan pengungkapan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Dalam organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas public merupakan suatu perwujudan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi maupun operasionalisasi/pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan (Supriyono, 2002)

Dalam Bastian (2006) akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik, dimana kinerja itu sendiri adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan 1997 dalam Brahmasari 2008). Oleh karena itu, akuntabilitas publik seharusnya tidak hanya memusatkan pada pemanfaatan sumberdaya (*input*) semata tetapi juga pada kinerjanya sehingga terbentuk suatu akuntabilitas kinerja.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2001 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic. Indikatornya yakni adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar adanya

sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalain dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya output dan outcome yang terukur (Solihin,2007)

Dalam mewujudkan praktik akuntabilitas tersebut, setiap SKPD diwajibkan menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj) kepada pemerintah daerah yang kemudian harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas kinerjanya secara horizontal kepada DPRD dan pihak terkait dan akuntabilitas secara vertical dengan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada pemerintah secara berjenjang. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, dimana kepala daerah disamping menyampaikan akuntabilitas keuangan , juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2003). Namun implementasi system AKIP tersebut tidaklah semulus yang diharapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar instansi dilingkungan pemerintah belum membuat dan melaksanakan system AKIP (Putra, 2007 BPKP Perwakilan Kaltim)

Penerapan akuntabilitas keuangan tentunya akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena akuntabilitas keuangan (*input dan output*) merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari input, output, benefit dan impact (Solihin, 2007)

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas khususnya akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Soleman (2007) dalam Jannah (2008) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten dan kota non pemekaran di Provinsi Maluku Utara.

Solihin (2007) pada Bintel dan orientasi nasional penguatan kedudukan/fungsi DPRD dan pemda pada pelaksanaan system pengawasan, budgeting dan legislasi berbasis kinerja menyatakan bahwa penerapan *good governance* di sector public akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga public.

Wardani (2008) juga menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sector public atau swasta. Dia juga menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sector public guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas public juga dikatakan sebagai instrument yang dianggap mampu dalam mengatasi tindakan korupsi (Kurniawan,2009)

Selain itu, hal kedua yang mungkin mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Secara umum komputerisasi telah membawa dampak yang luas dalam bidang pekerjaan akuntan dalam organisasi. Dampak utama adalah bahwa akuntan telah dapat mengalihkan aktivitasnya dari yang bersifat teknis kepada kegiatan yang

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa akuntan dapat memfokuskan dirinya pada tugas yang lebih profesional (Halim, 1995 dalam Novita, 2008).

Begitu juga akuntan di pemerintahan, IT dan Internet akan memaksa pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan (Raharjo, 2000 dalam Jannah 2008). Dalam harian Kompas, adapun keuntungan dari pemanfaatan informasi teknologi bagi pemerintahan yakni :

1. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang dan di canangkan pemerintah dapat berjalan lancar.
2. *e-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sector usaha dan industri.
3. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung pernyataan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Bandi (2006) dalam Novita (2008) yang menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Indriasari dan Ertambang (2007) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan

keuangan Pemerintah Kota Palembang, dimana nilai informasi pelaporan keuangan merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Namun, berbeda dengan Novita (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negative antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja individual akuntan. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali pemanfaatan informasi teknologi ini sendiri.

Keberhasilan kinerja saat ini pun hanya dinilai dari indicator input dan proses, yaitu penyerapan dana dan ketaatan pada peraturan perundangan. Namun, hal ini pun dapat dikatakan bertolak belakang, dimana dalam satu sisi peraturan perundangan salah satunya menyarankan agar penggunaan anggaran haruslah berdasarkan prinsip efisiensi, sedangkan disisi lain keberhasilan kinerja keuangan selama ini umumnya diukur berdasarkan unit bagaimana organisasi dapat menghabiskan anggaran yang diterimanya. Beberapa masalah lain berkaitan dengan peraturan perundangan pun muncul. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor: 3 tahun 2007, dikemukakan bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berupa neraca (*balance sheet*) dan laporan arus kas (*cash flow*). Kenyataannya, pemerintah daerah cenderung tidak dapat mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut.

Ketaatan pada peraturan perundangan inipun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system and

punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas (Solihin, 2007, dalam Bimtek dan Ornas penguatan fungsi DPRD dan Pemda).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2007) dalam Jannah (2008) yang menyatakan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh sangat signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu juga penelitian yang dilakukan Solikin (2004) yang meneliti tentang pelaporan akuntabilitas di Indonesia yang menemukan salah satu isunya bahwa adanya tekanan pihak ketiga, yaitu pemerintah dan peraturan perundangan yang dibuat untuk meningkatkan kinerja.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Pekanbaru sebagai salah satu kota yang memiliki APBD yang besar seharusnya dapat mengelola keuangan daerah secara maksimal dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada public. Salah satunya dengan melihat variable yang mempengaruhi diatas, seperti akuntabilitas keuangan yang memadai, penggunaan IT yang maksimal dan taatnya setiap SKPD terhadap peraturan perundangan.

Survey lembaga transparency internasional Indonesia yang menunjukkan dari 50 kota di survey, Pekanbaru termasuk 10 kota besar dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terburuk. Yang mengindikasikan praktek korupsi di kota Pekanbaru masih dinilai lazim dilakukan, terutama dalam konteks suap untuk mempercepat proses

birokrasi, kecurangan di pemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

Begitu juga dari hasil survey di masyarakat terhadap layanan public oleh pemerintah daerah, masyarakat masih merasakan adanya praktek tidak terpuji yang terjadi terhadap mereka. Survey dilakukan terhadap mereka lapisan masyarakat awam, pengusaha, dan lainnya (Senin, 23/2/2010, Dodi blog, wartawan tribuna Pekanbaru kepada kompas.com)

Ini menunjukkan masih banyaknya instansi yang belum mengindahkan peraturan perundangan yang telah di buat. Hal ini tentu menimbulkan dampak negative kepercayaan public terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota pekanbaru.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melihat pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada, (1) mengganti variable Budaya Organisasi dengan pemanfaatan IT yang diambil dari penelitian Novita (2008). (2) objek penelitian, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota Pekanbaru berbeda dengan Miftahul Jannah yang meneliti di Kabupaten Kampar, (3) metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi berganda, berbeda dengan Miftahul Jannah, yang menggunakan pet analisis. Regresi berganda digunakan pada penelitian yang melihat adanya pengaruh

antara variable independent terhadap variable dependen. Berbeda dengan Pet analisis, yang tidak hanya melihat pengaruh atau hubungan variable independent terhadap variable dependen, tetapi juga melihat pengaruh atau hubungan antar variable independent. Sehingga Regresi berganda dianggap tepat terhadap penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**
(Study pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ?
2. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan informasi teknologi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Apakah terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
2. Pengaruh pemanfaatan informasi teknologi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
3. Pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh antara penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan informasi teknologi dan

ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di instansi pemerintah yang ada di kota Pekanbaru.

2. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang sector public pada masa akan datang.
3. Menyediakan informasi sebagaimana pentingnya pengaruh penerapan akuntabilitas, pemanfaatan informasi teknologi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

D. Sitematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sitematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian serta pengembangan hipotesis.

BAB III : Bab ini merupakan bab metodologi penelitian yang meliputi objek penelitian dan penentuan sample, jenis dan sumber data, spesifikasi variable, alat pengukuran dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Bab ini memuat umum hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variable yang digunakan dalam penelitian

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian ini, memuat kesimpulan atas hasil penelitian, serta saran-saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang untuk judul penelitian yang sama.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006)

Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangkapencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam pandangan Islam, Allah swt telah memberikan pedoman kepada semua manusia agar transparan dan teliti dalam melaksanakan kinerja dalam kehidupan ini sehingga hasil dari pekerjaan tersebut dapat memuaskan orang lain dan juga dapat dipertanggungjawabkan apalagi kinerja bagi instansi pemerintah mereka pun harus lebih jujur dan transparansi dalam menjalankan program pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan.

Hal ini juga sesuai dengan hadits nabi Muhammad saw bersabda :

“ Sesungguhnya jujur itu menunjukkan pada kebajikan, dan kebajikan itu ke surga. Dan sesungguhnya seseorang itu jujur sehingga ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur.” (HR : Muttafaq ‘Alaih).

Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993) dalam Mahmudi, 2005, menyatakan dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sector publik :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity & legality*)
- b. akuntabilitas manajerial (*manajerial accounty*)
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- e. Akuntabilitas keuangan (*financial accounty*)

Akuntabilitas keuangan sendiri merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dimana sasaran pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN, 2000:28, Jannah 2008)

Akuntansi sektor publik mempunyai peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas public. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung arti sebagai proses pengumpulan, pengolahan dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

B. Pemanfaatan Informasi Teknologi

Pemanfaatan informasi teknologi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan technology informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Pemanfaatan technology informasi menurut Thomson et al. (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan technology pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan technology informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Dalam Alqur'an juga diterangkan bagaimana manusia bekerja sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Arrahman ayat 33 yang menerangkan :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُوَ قَائِمٌ يَرِيذُ أَنْ يُغْنِيَكُمْ عَنْهُ بِالضَّرَّاءِ وَالْكَافِرِينَ ۖ بَلْ أَنْقَذَكُمْ مِنْهُ وَالْجَمْعَ كُلَّهُ لِمَتِّ أُولَئِكَ ثُمَّ رَأَوْا النَّارَ الَّتِي يُوعَدُ لِمَنْ كَفَرَ ۚ إِنَّهَا هِيَ الْأُولَى ۖ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ ۚ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْأُولَىٰ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾

Artinya : “ Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”

Menurut ahli tafsir, ayat diatas menerangkan bahwa manusia harus bisa menguasai dan membuat teknologi agar manusia bisa mudah menyelesaikan pekerjaan, dan dengan kemampuan pemanfaatan informasi teknologi maka manusia bias mengurangi tenaga dalam bekerja.

Teknologi informasi selain sebagai technology computer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Computer sebagai salah satu komponen dari technology informasi maupun alat yang bias melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan computer juga bias mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

C. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Dihubungkan dengan syarat dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan sesuai tujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan Negara yang memadai, maka perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. Bakhtiar Arief dan Muklis Iskandar (2002:5) dalam Jannah (2008) memberi gambaran mengenai tujuan pemerintah dan akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tujuan secara umum yaitu mensejahterakan rakyat. Untuk

mewujudkan hal tersebut, rakyat membuat aturan-aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundangan lainnya.

Sugianto et.al (2002;9) memberi gambaran mengenai peraturan dasar akuntansi pemerintah Republik Indonesia, yaitu akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah akuntansi anggaran, dimana akuntansi anggaran adalah akuntansi pemerintah republic Indonesia mengenai anggaran Negara yang dapat diatur dalam ketentuan akuntansi anggaran.

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan undang-undang APBN. Pemerintah harus membuat pertanggungjawaban keuangan Negara, pertanggungjawaban keuangan Negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas public yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan Negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

System hukum yang dianut Indonesia dalam system akuntansi sector public adalah system *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sector public yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perundangan.

Stufen Theories dalam Jannah (2008) berpendapat bahwa suatu system hukum adalah suatu hierarki dari hokum dimana suatu ketentuan hokum lainnya yang lebih tinggi sebagai ketentuan hokum yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma

dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.

Implementasi dari stuffen teori dalam system hukum Indonesia, telah diatur dalam ketentuan MPRS Nomor : XX/MPRS/1996; saat ini telah diatur sesuai dengan TAP MPR Nomor : III Tahun 2000 dengan susunan hierarki berikut :

1. Undang-undang dasar 1945
2. Ketentuan MPRS indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)
5. Keputusan presiden (Kepres) dan
6. Peraturan daerah (Perda)

Sedangkan jika dihubungkan dengan masalah akuntabilitas sendiri, beberapa peraturan yang dikeluarkan antara lain :

1. Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - ~ PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
 - ~ RPP tentang System Pengendalian Intern
4. UU No. 25/2004 tentang SPPN :

~ PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Pembangunan.

5. UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah :

~ RPP tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

~ PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

D. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik dan bersih (*good governance and clean governance*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Dalam Inpres No. 7 tahun 2001 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
2. Berdasarkan system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian saran dan tujuan yang telah ditetapkan akuntabilitas instansi pemerintah pusdiklatwas BPKP – 2007
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

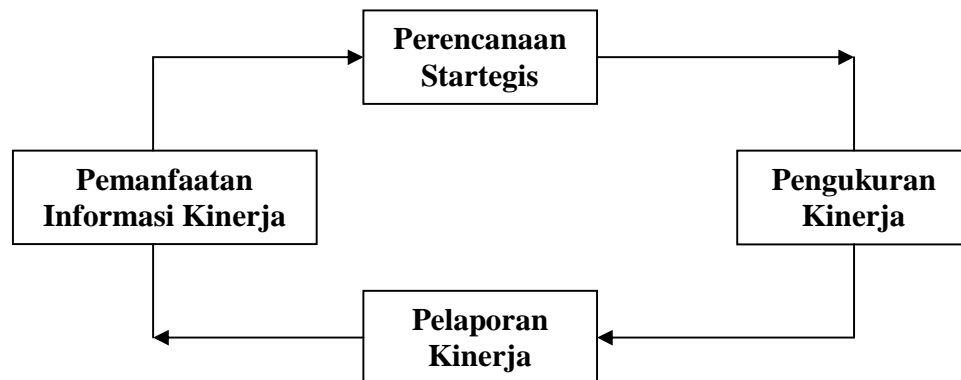
Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, agar pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan strategis
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat digambarkan berikut ;

Gambar. II.1: Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(Sumber: Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh kepala Lembaga Administrasi Negara)

E. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu hal yang sangat mungkin mempengaruhi AKIP adalah akuntabilitas keuangan sendiri. Ketika pemerintah melaporkan kinerjanya secara akuntabel, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban kinerjanya yang dilaporkan dalam LAKIP. Karena pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari kegiatan/program

yang telah dilaksanakan mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya yang tersedia guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Solihin, 2007)

Salah satu prinsip yang telah diatur berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah haruslah jujur, objektif, transparan dan akurat berarti instansi pemerintah harus juga akuntabel atas kinerjanya terhadap public. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Salah satunya (Jannah 2008) yang meneliti tentang *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Budaya Organisasi Yang Berlaku Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Begitu juga pernyataan Solihin (2007) pada BinteK dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD dan Pemda pada pelaksanaan sistem pengawasan, budgeting dan legislasi berbasis kinerja menyatakan bahwa penerapan good governance di sector public akan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik.

Wardani (2008) juga menyatakan bahwa penerapan good corporate governance yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sector public atau swasta. Akuntabilitas public juga dikatakan sebagai instrument yang dianggap mampu dalam mengatasi tindakan

korupsi (dalam Kurniawan,2009) sehingga dapat diambil hipotesis bahwa penerapan akuntabilitas akan mempengaruhi AKIP.

F. Pengaruh Penerapan Informasi Teknologi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hal kedua yang juga dapat mempengaruhi tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah teknologi informasi. Sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi, manusia diharapkan dapat mengikuti kemajuan tersebut dan dapat memanfaatkan teknologi guna mempermudah mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Secara umum komputerisasi telah membawa dampak yang luas dalam bidang pekerjaan akuntan dalam organisasi. Dampak utama adalah bahwa akuntan telah dapat mengalihkan aktivitasnya dari yang bersifat teknis kepada kegiatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa akuntan dapat memfokuskan dirinya pada tugas yang lebih professional (Halim,1995 dalam Novita, 2008)

Begitu juga di pemerintahan, diharapkan akuntan di setiap SKPD dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi tersebut dengan maksimal. Sehingga, dapat menjadi lebih professional guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijana (2007) yang menyatakan bahwa pemanfaatan informasi teknologi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten tebanan juga mendukung pernyataan tersebut..

Hanya Novita (2009) yang mendapat hasil berbeda, yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja individual akuntan intern pada beberapa bank di Pekanbaru.

G. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketaatan terhadap peraturan perundangan diperkirakan juga akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alasannya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari peraturan perundangan yang harus ditaati. Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara, dimana pada point kedua dikatakan bahwa pelaksanaan AKIP harus berdasarkan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Solihin (2007) mengemukakan untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi AKIP.

Hipotesis ini diperkuat ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Jannah (2008) yang menemukan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sodikin (2004) juga meneliti tentang accountability reporting in Indonesia yang

menyimpulkan adanya tekanan dari pihak ketiga, yaitu pemerintah dan peraturan yang dibuatnya dalam meningkatkan kinerja

H. Kerangka Teoritis, Model Penelitian Dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

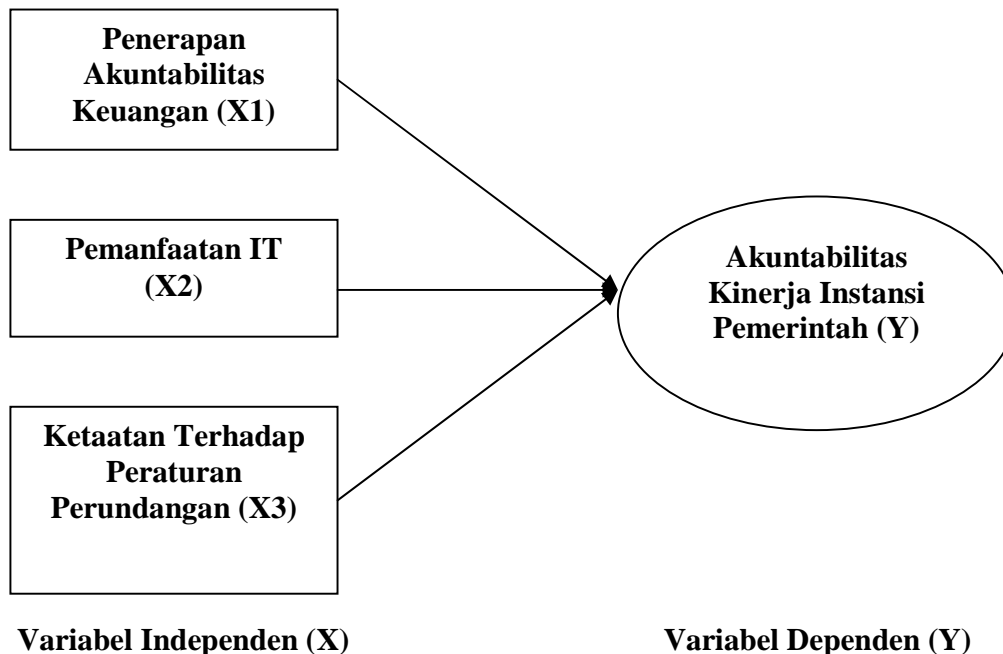
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodic (Inpres No. 7 Tahun 2001)

Pelaksanaan AKIP sendiri haruslah berdasarkan antara pada prinsip-prinsip yang telah diatur berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara. Sehingga, dapat dilihat beberapa factor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sendiri, seperti akuntabilitas keuangan itu sendiri, pemanfaatan informasi teknologi dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

2. Model Penelitian

Dari penjelasan mengenai setiap pengaruh variable independent terhadap variable dependen dapat digambarkan bahwa Penerapan Akuntabilitas, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Dianggap Memiliki Hubungan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut :

Gambar II.2 Model Penelitian



Hubungan antara Penerapan Akuntabilitas, Pemanfaatan IT, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengembangan Hipotesis

Dapat dilihat dari model penelitian diatas bahwa semua variable independent memiliki hubungan dengan variable dependennya.

A. Hubungan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap AKIP

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dengan penerapan akuntabilitas keuangan itu sendiri diharapkan akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti (Jannah 2008) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Kampar, dapat dilihat bahwa :

H_{a1} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap AKIP

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et al. (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang di harapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Indiasari dan Ertambang (2007) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan technology informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah kota palembang menunjukkan bahwa :

H_{a2} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Hubungan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap AKIP

Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara, dimana pada poin kedua dikatakan bahwa pelaksanaan AKIP harus berdasarkan suatu system yang

dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan perundang undangan ini akan memiliki hubungan erat dengan AKIP.

Dari beberapa penelitian seperti (Jannah 2008) yang menemukan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat menunjukkan bahwa :

H_{a3} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Primer dan Sekunder. Sedangkan sumber data berasal dari Pengumpulan data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner (*mail questioner*), yang berisi daftar pertanyaan yang diambil dari penelitian Jannah (2008) dan Novita (2008) yang ditunjukkan pada responden yang ikut dalam pembuatan LAKIP pada 42 Satuan Kerja Pemerintah daerah kota Pekanbaru. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari referensi dari buku, internet, ataupun data dari instansi terkait.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari :

1. Penelitian Lapangan

yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisi pertanyaan kepada instansi terkait melalui pos, dan jika belum terpenuhi penulis akan mencoba untuk meninjau secara langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi dengan pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

yaitu cara memperoleh data sekunder yang memberikan landasan teori guna mendukung data-data primer maupun sekunder yang diperoleh selama penelitian serta untuk menunjang pembahasan identifikasi masalah. Data-data ini diperoleh dari buku , pencarian di internet serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Populasi, Sample Dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 1998;15) sedangkan sample adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 1998;17)

Penentuan jumlah sample sangat bergantung pada populasi yang ada, Sebagian mengatakan apabila populasi kurang dari 100, sebaiknya menjadi sample penelitian semua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintah terkait di Pekanbaru yang berjumlah 42 unit. Responden dalam penelitian ini adalah para pejabat bagian keuangan/bagian perencanaan/ pembuat laporan keuangan dalam suatu organisasi terkait. Karena jumlah populasi tidak mencapai 100 responden, maka yang menjadi sampel penelitian adalah semua Populasi yang mana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintah terkait di Pekanbaru yang berjumlah 42 unit.

Tabel.III.1 Populasi dan Sample penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
1	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
3	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Koperasi dan UKM
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7	Dinas Pasar
8	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
10	Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Sosial dan Pemakaman
14	Dinas Pertanahan
15	Dinas Ketahanan Pangan
16	Dinas Pendapatan Daerah
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
19	Dinas Tenaga Kerja
20	Dinas Pertanian
21	Kantor Arsip Daerah
22	Kantor Inspektorat
23	Kantor Kesbag Polinmas
24	Kantor Satpol Pamong Praja
25	Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Terpadu
26	Kantor Camat Pekanbaru Kota
27	Kantor Camat Sukajadi
28	Kantor Camat Senapelan
29	Kantor Camat Lima Puluh
30	Kantor Camat Sail
31	Kantor Camat Bukit Raya
32	Kantor Camat Marpoyan Damai
33	Kantor Camat Payung Sekaki
34	Kantor Camat Rumbai
35	Kantor Camat Rumbai Pesisir
36	Kantor Camat Tampan
37	Kantor Camat Tenayan Raya
38	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
39	Badan Lingkungan Hidup
40	Badan Pelayanan Terpadu
41	Badan Kepegawaian Daerah
42	Badan Perencanaan Modal dan Promosi

(Sumber : pekanbaru.go.id)

D. Pengukuran Variabel

Variable-variabel dalam penelitian ini adalah variable independent dan variable dependen. Variable independent adalah penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan IT dan ketaatan pada peraturan perundangan, sedangkan variable dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkait.

1. Akuntabilitas Keuangan

Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993), dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sector public (Mahmudi,2005:10) adalah ;

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity & legality*)
- b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- e. Akuntabilitas financial (*financial accountability*)

Akuntabilitas keuangan sendiri merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, perlengkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dimana sasaran pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN,2000:28 dalam Jannah 2008).

2. Pemanfaatan Informasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et al. (2001) dalam Tjhai (2003:3) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Manfaat teknologi informasi menurut Chin dan Todd (1995) dalam Rahadi (2007) yaitu:

1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
2. Bermanfaat (*usefull*)
3. Menambah produktivitas (*increase productivity*)
4. Mempertinggi efektivitas (*enchance effectiveness*)
5. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*)

3. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Sugianto et al. (2001;9) memberi gambaran mengenai peraturan dasar akuntansi pemerintah republic Indonesia, yaitu akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah akuntansi anggaran, dimana akuntansi anggaran adalah akuntansi pemerintah

Republik Indonesia mengenai anggaran Negara yang dapat diatur dalam ketentuan akuntansi anggaran.

System hukum yang dianut Indonesia dalam system akuntansi sektor publik adalah system *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sector publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perundangan.

Dalam ketentuan MPRS No. XX/MPRS/1996; saat ini telah diatur sesuai ketentuan TAP MPR No. III Tahun 2000 dengan susunan hirarki sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republic Indonesia
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5) Keputusan Presiden (Kepres)
- 6) Peraturan Daerah (Perda)

Sedangkan jika dihubungkan dengan masalah akuntabilitas sendiri, beberapa peraturan yang dikeluarkan antara lain:

- 1) Inpres 7/2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - ~ PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

3) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara :

~ RPP tentang System Pengendalian Intern.

4) UU No. 25/2004 tentang SPPN :

~ PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah :

~ RPP tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

~ PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2001 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Yang intinya meliputi tahap 1) penetapan perencanaan strategik 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja, 4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pelaksanaan AKIP sendiri harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip :

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan akuntabilitas instansi pemerintah pusdiklatwas BPKP 2007.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

E. Instrumen Penelitian

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi satu, urutan data kualitatif adalah *the likert scale* yang merupakan suatu pengukuran dengan skala ordinal yang memungkinkan peneliti untuk mengurut respondennya dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Dimana, masing-masing variable diberi daftar pertanyaan yang diambil dari kuesioner Jannah (2008) dan Bandi (2006) yang dibuatnya sendiri, dalam Novita (2008), kemudian, masing-

masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ekstrim negative dan nilai 5 untuk jawaban ekstrim positif.

F. Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis dan indicator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga penyajian hipotesis dengan menggunakan alat Bantu statistic dapat dilakukan secara benar. Masing-masing variabel memiliki beberapa pertanyaan yang merupakan instrumen pertanyaan yang diambil dari penelitian Jannah (2008) dan Bandi (2006) dalam Novita (2008) yang keseluruhannya menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur (Nur Indriantoro,2006).

Variabel pertama penerapan akuntabilitas keuangan (X1) memiliki 6 pertanyaan yang termasuk anggaran dan nota penggunaan anggaran. Pertanyaan tersebut diambil dari instrument pertanyaan yang digunakan Jannah (2008). Variabel kedua, pemanfaatan technology informasi (X2) memiliki 19 pertanyaan yang termasuk sasaran penggunaan, tanggungjawab dan otorisasi, fungsi setiap bagian, para pengguna dan prosesnya. Adapun pertanyaan tersebut diambil dari instrument pertanyaan yang digunakan Bandi (2006) dalam Novita (2008). Variabel ketiga, ketaatan pada peraturan perundangan (X3) memiliki 11 pertanyaan yang termasuk tujuan peraturan perundangan, azas formal peraturan dan azas material peraturan.

Sedangkan untuk variabel keempat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) memiliki 7 pertanyaan yang termasuk perencanaan strategik dan indikator kinerja kegiatan. Berikut ini penjelasan lengkap dengan tabel.

Tabel III.2. Operasional/Pengukuran Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1)

Dimensi	Indikator	Skala
1. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Terhadap Peraturan Perundangan - Integritas Pengurusan Keuangan Dan Penganggaran - Tujuan Pengeluaran Keuangan - Objek Pengeluaran Keuangan 	Ordinal
2. Nota Perhitungan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan - Dapat Diperiksa 	

Sumber : Peneliti terdahulu, Jannah (2008)

Tabel III.3 Operasioanal/Pengukuran Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi (X2)

Dimensi	Indikator	Skala
1. Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Didukung Oleh Proyek Bidang IT - Telaah Terhadap Peluang Yang Diberikan IT - Informasi Yang Memadai Tentang Penggunaan IT - Gambaran Cakupan Serta Kualitas IT Yang Digunakan - Perancangan Proyek IT Yang Diprioritaskan - Operasionalisasi Mengenai Arah Dan Pengembangan IT Secara Jelas Di Ungkapkan 	Ordinal
2. Pertanggungjawaban & otoritas	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek Bidang IT Benar-Benar Ditelaah - Monitoring Terhadap Kinerja Dan Fungsi IT - Memiliki Fungsi Dan Tujuan Yang Jelas - Memiliki Criteria Yang Jelas 	
3. Fungsi Bagian IT	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Pendapat Sebagai Perhatian Dalam Perencanaan Dan Penerapan IT - Memahami Semua Jenis Kebijakan 	
4. Pengguna IT	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur TI Sesuai Dengan Struktur Organisasi 	

5. Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Ahli IT Dan Pemakai IT Konsruktif - Perencanaan Top Down Untuk Mengaitkan Antara System Informasi Dan Kebutuhan Kantor Pimpinan Berpendapat Bahwa Eksploitasi Di Bidang IT Akan Dating Merupakan Kepentingan Strategis - Sumber-Sumber Pengembangan IT Ada Di Setiap Bagian Kerja - Pengenalan Atau Percobaan IT Baru Yang Ada Dalam Setiap Tingkatan Bagan Kerja Dilakukan Pengawasan 	Ordinal
-----------	--	---------

Sumber : Peneliti terdahulu, Novita, 2008

Tabel III.4 Operasional/Pengukuran Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan(X3)

Dimensi	Indikator	Skala
1. Tujuan Peraturan Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketertiban - Kepastian hokum 	Ordinal
2. Azas Formal Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Azas tujuan instansi yang jelas - Azas lembaga yang tepat - Azas perlunya peraturan - Azas dapat dilaksanakan - Azas consensus 	
3. Azas Material Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Azas terminology peraturan - Azas sistematika peraturan - Azas perlakuan yang sama dalam hokum - Azas pelaksana hukum 	

Sumber : Peneliti terdahulu, Jannah (2008)

Table.III.5 Operasioanal/Pengukuran Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

Dimensi	Indikator	Skala
1.Perencanaan strategik	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Sasaran 	Ordinal
2. indicator kinerja kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan (<i>Input</i>) - Keluaran (<i>Output</i>) - Hasil (<i>Out Come</i>) 	

	- Manfaat (<i>Benefit</i>) - Dampak (<i>Impack</i>)	
--	--	--

Sumber : Peneliti terdahulu, Jannah (2008)

G. Pengujian Data

Keteapatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada suatu kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Menurut Simangarimbun (2000) dalam Arianto (2003), data penelitian yang di dalam pengumpulannya seringkali menuntut pembiayaan, waktu dan tenaga besar, tidak akan berguna bilamana alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi.

1) Uji Validitas

Sebelum dilakukan pengolahan data maka dilakukan data terhadap variabel tersebut. Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur variabel yang akan diukur. Suatu instrument valid apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Singarimbun,1987 dalam, Arianto 2003)

Karena skala pengukuran item pernyataan adalah ordinal, maka perhitungan validitas menggunakan pearson correlation. Validitas pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan menghubungkan setiap pernyataan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini pernyataan yang memiliki koefisien korelasi yang lebih kecil dari 0,5 berarti tidak lolos uji validitas dan pernyataan ini harus dibuang (Indrianto Nur,2002). Suatu tes atas instrument pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang

tinggi apabila instrument tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Uji yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai uji yang memiliki validitas rendah.

2) Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah angka indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1987). Dengan kata lain reliabilitas menunjukkan suatu konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala yang sama.

Untuk menguji reliabilitas dipergunakan uji *cronbach alpha* yang dianggap paling sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian yang memiliki skor 1- 5. Dalam metode internal consistency ini, semakin tinggi konsistensi alpha maka kuesioner semakin reliabel. Batasan nilai minimum alpha dalam penelitian ini adalah 60 (Ghozali, 2002). Jadi, jika alpha lebih besar dari 60, maka data dianggap *reliable*.

H. Analisis Data

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statistika.

Untuk membahas mengenai dua variabel numerik atau lebih, termasuk hubungan antara keduanya maka teknik yang digunakan adalah regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen (tergantung) dan variabel independen (bebas) (Santoso, 2007). Karena jumlah variabel dalam penelitian ini lebih dari satu variabel independen maka analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Namun sebelumnya terlebih dahulu akan diuji apakah data yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis dengan metode ini.

Pengujian Asumsi untuk memenuhi syarat Regresi (Uji Asumsi Klasik)

Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Gujarati, 2001). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bias dipenuhi.

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Gozali, 2001).

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independent yang satu dengan variabel independent yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel x tidak saling berkorelasi liner. Sesungguhnya multikolinearitas itu tetap ada pada setiap variabel independent, hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak. Untuk mendeteksi, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor (VIF)* Dan tolerance untuk tiap variabel independent. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai tolerance $< 0,10$ berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2001). Konsekuensi yang ditimbulkan akibat masalah multikolinearitas adalah pertama hasil regresi tersebut hanya valid pada waktu, sample, variabel dan penelitian tersebut. Kedua probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah meningkat dan ketiga, memungkinkan peneliti memperoleh R^2 yang tinggi tapi tidak satupun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir signifikan secara statistic.

Tindakan perbaikan apabila terdapat gejala multikolinearitas di luar batas yang bias diterima dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel yang berkolinearitas atau dengan jalan mentransformasi persamaan regresi sedemikian rupa sehingga variabel x tidak menunjukkan gejala multikolinearitas yang

berbahaya. Untuk membuang variabel x tidak yang berkolinear tersebut dapat menggunakan metode frish, yaitu memasukkan variabel x yang berkolinear kedalam persamaan regresi. Apabila R^2 bertambah besar, berarti variabel x tersebut masih dapat dipakai tetapi kalau R^2 tidak naik, maka variabel tersebut merupakan variabel yang penting dalam penelitian dan peneliti tetap berkeinginan untuk melakukan regresi dengan variabel tersebut, maka multikolinearitas tersebut bias diatasi dengan mentransformasikan persamaan regresi. Seluruh persamaan regresi tersebut dibagi dengan variabel x yang berkolinearitas sehingga menghasilkan persamaan regresi baru yang besarnya $1/x$.

3) Uji Auto Korelasi

Uji Auto Korelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time series (runtut waktu). Pada data *Crossection* (silang waktu) masalah autokorelasi relative jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Adapun untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan tes statistik Durbin Watson yaitu :

- 1) Jika D-W dibawah -2, maka terdapat korelasi positif

2) Jika D-W diantara -2 s/d =2, maka tidak terdapat autokorelasi

3) Jika D-W diatas =2, maka terdapat autokorelasi negative

4) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatanlain. Sementara itu dalam situasi terdapatnya heterokedastisitas , peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sama sekali salah karena pengujian t dan F sangat mungkin membesarkan signifikansi statistic dari parameter yangditaksir sedangkan konsekuensi dari autokorelasi adalah nilai t dan F tidak lagi sah dan jika diterapkan akan memberikankesimpulan lain yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistic dari kjoefisien regresi yang ditaksir.

Untuk memenuhi asumsi heterokedastisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala heterokedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan melihat melalui pola diagram pencar (scatterplot). Jika scatterplot membentuk polatertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Sebaliknya jika scatterplot tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan Heterokedastisitas.

I. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yang diuji dengan menggunakan Regresi Berganda. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh antara penerapan akuntabilitas keuangan (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(AKIP) (Y), hipotesis kedua tentang pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), hipotesis ketiga tentang pengaruh antara ketaatan pada peraturan perundangan (X3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dan menggunakan koefisien korelasi yang dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi Parsial

X_1 = Penerapan Akuntabilitas Keuangan

X_2 = Pemanfaatan Informasi Teknologi

X_3 = Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan

Setelah dilakukan analisa penelitian dengan koefisien korelasi Regresi, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan pengaruh antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen,. pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen

H_a : Variabel Independen berpengaruh terhadap Variabel Dependen

Pedoman untuk menolak atau menerima hipotesis jika hipotesis alternatif yang diusulkan (H_a) :

- a. H_a diterima jika p value \leq level of signifikan (α)
- b. H_a ditolak jika p value $>$ level of signifikan (α)

Selain itu pengujian juga ditentukan berdasarkan perbandingan besarnya t hitung dengan t tabel, yang mana jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan tetapi jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan

Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variansi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama variabel terikat/seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien determinan akan berkisar 0 sampai 1, bila nilai koefisien determinan = 1 menunjukkan 100 %. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinan = 0, maka menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh variabel bebas (Suhardi dalam Purnomo, 2004).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, dan objek penelitian serta metode penelitian. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan penghitungan statistic serta pengujian hipotesis untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk survey dengan menggunakan pendekatan *Ekplanatory Research* atau penelitian penjelasan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara variable independent yaitu untuk Penerapan Akuntabilitas Keuangan , Pemanfaatan IT dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan sebagai variable dependennya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kuesioner diberikan kepada 42 Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Masing-masing SKPD diberikan satu kuesioner kepada bagian yang membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Lama pengembalian kuesioner dalam jangka waktu 1 bulan. Pada jumlah kuesioner yang diisi sebanyak 38 buah dengan tingkat respon 90,48%. Semua total kuesioner dapat digunakan karena telah sesuai dengan yang diinginkan penulis.

Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Sample dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	42	100%
Kuesioner yang kembali	38	90,48%
Kuesioner yang tidak kembali	4	9,52%
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Kuesioner yang dapat dianalisis	38	100%

Sumber: Data Olahan (2010)

2. Karakteristik Responden

Dari 38 kuesioner yang diolah, berdasarkan jenis kelamin diketahui yang menjadi Responden dalam penelitian ini umumnya Pria yaitu sebanyak 22 orang dan Wanita sebanyak 16 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 1 orang. D3 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 20 orang dan S2 sebanyak 12 orang . data demografi responden selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Rincian mengenai karakteristik responden penelitian disajikan dalam table IV.2 berikut:

Tabel IV.2. Gambaran Umum Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin		
- Pria	22	57,90%
- Wanita	16	42,10%
Pendidikan		
- SLTA	1	2,63%
- D3	5	13,16%
- S1	20	52,63%
- S2	12	31,58%

Sumber: Data Olahan (2010)

3. Statistika Deskriptif Variabel

Untuk memberikan gambaran mengenai variable-variabel penelitian yang digunakan, analisa data yang dilakukan terhadap 38 kuesioner yang memenuhi Kriteria. Data yang diolah menjelaskan rata-rata jawaban responden dari variable independent yaitu untuk Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan IT dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan sebagai variable dependennya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut hasil statistic deskriptif.

Tabel IV.3. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics			
Variabel Penelitian	Mean	Std. Deviation	N
AKIP	30.4474	3.26072	38
Penerapan Akuntabilitas Keuangan	26.7368	2.75764	38
Pemanfaatan IT	63.2632	10.07454	38
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	49.9474	4.17164	38

Sumber: Data Olahan (2010)

Berdasarkan hasil statistic deskriptif variable, dapat dilihat bahwa variable Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variable independent mempunyai nilai rata-rata (mean) total jawaban responden sebesar 30,45 dan standar deviasi sebesar 3,261. hingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 30,45 dibagi 7 pertanyaan = 4,35 jawaban. Sedangkan untuk variable Penerapan Akuntabilitas Keuangan mempunyai nilai rata-rata (mean) jawaban responden sebesar 26,74 dan standar deviasi sebesar 2,758. sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Akuntabilitas

Keuangan adalah $26,74 \div 6 \text{ pertanyaan} = 4,46 \text{ jawaban}$. Untuk variable Pemanfaatan Informasi Teknologi mempunyai nilai rata-rata (mean) jawaban responden sebesar 63,26 dan standar deviasi sebesar 10.074 sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah $63,26 \div 19 \text{ pertanyaan} = 3,33 \text{ jawaban}$. Dan untuk variable Ketaatan pada Peraturan Perundangan mempunyai nilai rata-rata (mean) jawaban responden sebesar 49,95 dan standar deviasi sebesar 4,172 sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan adalah $49,95 \div 11 \text{ pertanyaan} = 4,54 \text{ jawaban}$.

B. Hasil Pengujian Data

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian data atas kuesioner yang diperoleh, pengujian data mencakupi uji validitas dan reabilitas dari item-item pernyataan untuk masing-masing variable, yaitu untuk Penerapan Akuntabilitas Keuangan (Variable X1), Pemanfaatan IT (variable X2), dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang Undangan (Variable X3) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Variable Y). pengujian Validitas dan Reabilitas ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan Software Statistic SPSS versi 16.0.

1. Hasil Pengujian Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin di ukur atau tidak. Dalam penelitian ini, uji validitas

dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dalam kuesioner telah dapat mengukur variable penelitian yang di inginkan.

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden atas seluruh pernyataan dengan jumlah total jawaban responden atas seluruh pernyataan. Koefisien korelasi tiap item akan dibandingkan dengan 0,5 jika nilai korelasi suatu item/pernyataan lebih kecil dari 0,5, maka pernyataan tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan.

a. Validitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil uji Validitas pernyataan-pernyataan kuesioner variabel penerapan Akuntabilitas Keuangan, nilai korelasi person untuk pernyataan nomor 2 adalah dibawah 0,5 sehingga dinyatakan tidak valid. Dan selainnya diatas 0,5 dinyatakan valid digunakan dalam pengujian, hasil pengujian validitas variabel ini dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut:

Tabel IV.4 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Butir Pertanyaan	Pearson's Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,696	>0,5	Valid
2	0,492	>0,5	Tidak Valid
3	0,628	>0,5	Valid
4	0,726	>0,5	Valid
5	0,818	>0,5	Valid
6	0,812	>0,30	Valid

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

b. Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil uji Validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner untuk variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi, nilai korelasi person's untuk item pernyataan nomor 14,15, 16 adalah dibawah 0,5 sehingga dinyatakan tidak valid dan selainnya diatas 0,5 yang disimpulkan pernyataan tersebut adalah valid, dan digunakan dalam pengujian, hasil pengujian validitas variabel ini dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut:

Tabel IV.5 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Butir Pertanyaan	Pearson's Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,506	>0,5	Valid
2	0,734	>0,5	Valid
3	0,614	>0,5	Valid
4	0,626	>0,5	Valid
5	0,644	>0,5	Valid
6	0,796	>0,5	Valid
7	0,770	>0,5	Valid
8	0,594	>0,5	Valid
9	0,611	>0,5	Valid
10	0,744	>0,5	Valid
11	0,701	>0,5	Valid
12	0,581	>0,5	Valid
13	0,575	>0,5	Valid
14	0,454	>0,5	Tidak Valid
15	0,317	>0,5	Tidak Valid
16	0,325	>0,5	Tidak Valid
17	0,620	>0,5	Valid
18	0,543	>0,5	Valid
19	0,616	>0,5	Valid

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

c. Validitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Berdasarkan hasil uji Validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner untuk variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan, nilai korelasi pearson's untuk item pernyataan nomor 3 adalah dibawah 0,5 sehingga dinyatakan tidak valid dan selainnya diatas 0,5 yang disimpulkan pernyataan tersebut adalah valid, hasil pengujian validitas variabel ini dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Butir Pertanyaan	Pearson's Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,670	>0,5	Valid
2	0,576	>0,5	Valid
3	0,344	>0,5	Tidak Valid
4	0,830	>0,5	Valid
5	0,803	>0,5	Valid
6	0,742	>0,5	Valid
7	0,587	>0,5	Valid
8	0,729	>0,5	Valid
9	0,742	>0,5	Valid
10	0,535	>0,5	Valid
11	0,624	>0,5	Valid

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

d. Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji Validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai korelasi pearson's untuk pernyataan nomor 3 adalah dibawah 0,5 sehingga dinyatakan

tidak valid. Dan selainnya diatas 0,5 yang disimpulkan pernyataan tersebut adalah valid, hasil pengujian validitas variabel ini dapat dilihat pada tabel IV.7 berikut:

Tabel IV.7 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Butir Pertanyaan	Pearson's Correlation	Kriteria	Keterangan
1	0,784	>0,5	Valid
2	0,723	>0,5	Valid
3	0,451	>0,5	Tidak Valid
4	0,873	>0,5	Valid
5	0,574	>0,5	Valid
6	0,714	>0,5	Valid
7	0,709	>0,5	Valid

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

2. Hasil Pengujian Reabilitas

Seluruh item pernyataan yang valid tersebut kemudian diuji dengan konsistensi internal untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan, dalam penelitian ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reabilitas terhadap item-item kuesioner untuk masing-masing variabel akan dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Cronbach Alpha*. Dimana semakin tinggi nilai koefisien reabilitas suatu instrumen , suatu alat ukur menunjukkan semakin tingginya keandalan instrumen atau alat ukur tersebut, yang mana diatas nilai minimal 60 % (Ghozali, 2001). Hasil pengujian validitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut :

Tabel IV.8 Rekapitulasi Uji Reabilitas

Variabel	Croanbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan (X1)	0,788	>0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,898	>0,60	Reliabel
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan (X3)	0,867	>0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,795	>0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

a. Reabilitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, Dapat dilihat hasil perhitungan yang diperoleh koefisien Reabilitas dengan teknik korelasi *Alpha Cronbach* sebesar 0,788, ternyata semua item pernyataan Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan Reliabel, karena nilai korelasi alpha cronbach Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan besar dari 60% (> 0,60).

b. Reabilitas Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, Dapat dilihat hasil perhitungan yang diperoleh koefisien Reabilitas dengan teknik korelasi *Cronbach Alpha* sebesar 0,898, jika dilihat pada rincian perhitungan ternyata semua item pernyataan reliabel. karena nilai korelasi alpha cronbach Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi besar dari 60% (> 0,60).

c. Reabilitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, Dapat dilihat hasil perhitungan yang diperoleh koefisien reabilitas Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dengan teknik

korelasi *Cronbach Alpha* sebesar 0,867, ternyata semua item pernyataan reliabel, karena alpha yang dihasilkan besar dari 60% ($>0,60$).

d. Reabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, Dapat dilihat hasil uji Reabilitas untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan teknik korelasi *Cronbach Alpha* diperoleh koefisien korelasi *Cronbach Alpha* sebesar 0,795 jika dilihat pada rincian perhitungan ternyata item pernyataan reliabel, karena alpha yang dihasilkan besar dari 60% ($> 0,60$).

C. Pembahasan dan Hasil Pengujian Hipotesis

Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian melalui proses pengumpulan data dan pengolahan awal merupakan dasar bagi pengujian hipotesis, pembahasan masalah dan penarikan kesimpulan.

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

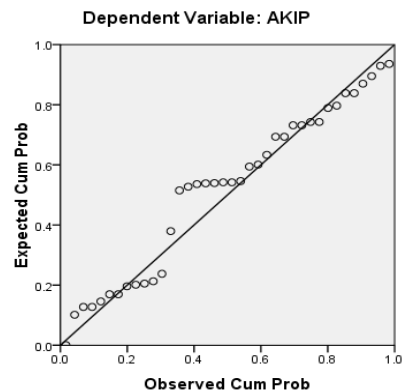
a. Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan alat uji statistik *normal probability plot* (normal p-p plot) terhadap masing-masing variabel. Menurut Ghozali, (2001) *normal probability plot* dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (observed normal) dan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika sebaran data berada disekitar garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi dengan normal. Dapat dilihat pada gambar IV.I berikut:

Gambar IV.1

Gambar Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

Hasil uji normal P-P Plot (*Normal P-P Plot*) untuk variabel Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada gambar IV.1 diatas. Dari gambar VI.1 diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mendekati garis diagonal maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas atau dikatakan normal.

b. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Dengan menggunakan software SPSS 16.0, maka deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*Varian Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$ berarti

terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2001). Hasil uji Multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut:

Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Kesimpulan
Penerapan Akuntabilitas Keuangan	.394	2.539	Bebas Multikolinearitas
Pemanfaatan IT	.920	1.087	Bebas Multikolinearitas
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	.399	2.505	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas semua nilai VIF variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya diatas angka 0,10. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gangguan multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

c. Hasil Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel IV.10 dibawah ini:

Tabel IV.10 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826 ^a	.683	.655	1.91492	1.493

a. Predictors: (Constant), KPPU, IT, AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

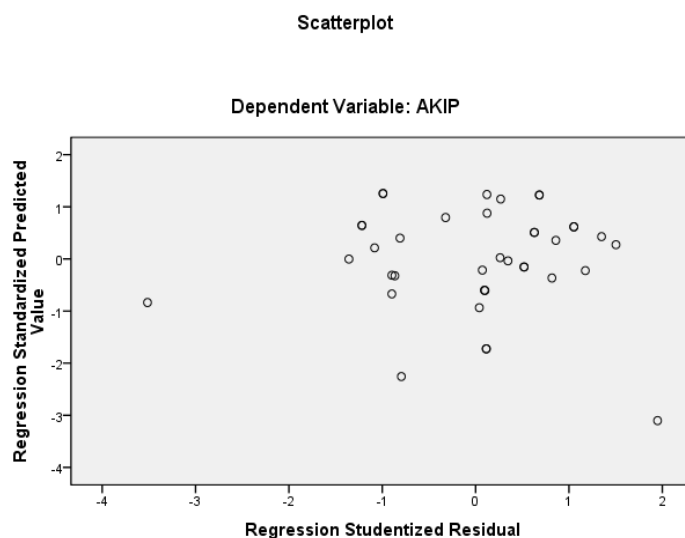
Dari tabel diatas diperoleh angka Durbin Watson 1,493, angka tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka tersebut berada di daerah *No Autocorelation* ($-2 <$ atau > 2).

d. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*scatterplot*). Jika (*scatterplot*) membentuk pola tertentu maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Sebaliknya jika (*scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

GAMBAR IV.2

Gambar Hasil Scatterplot



Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

Dari grafik *Scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisi regresi linier berganda dianggap tepat dalam pengujian ini karena analisis regresi tidak hanya menentukan besarnya pengaruh variabel independen, tetapi juga menunjukkan arah dari pengaruh tersebut. Ringkasan hasil pengujian dengan bantuan *software* SPSS (Statistical Product And Service Solution) versi 16.0. adapun hasil pengujian regresi linear berganda, dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11 Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)		Standardized Coefficients	t hitung	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.449	3.928		.114	.910
Penerapan Ak. Keuangan (X ₁)	.608	.182	.515	3.345	.002
Pemanfaatan IT (X ₂)	-.013	.033	-.040	-.394	.696
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X ₃)	.291	.119	.373	2.438	.020
R : 0,826 R square : 0,683 Adjusted R Square : 0,655 Sig. F : 0,000					

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

Dari tabel IV.10 dapat dilihat bahwa nilai *p-value* $0,000 < 0,05$, artinya signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan dapat diterima, yaitu Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada

Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru. Namun, tidak berlaku bagi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel diatas dapat ditentukan formulasi untuk analisis linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,449 + 0,608 X_1 - 0,013 X_2 + 0,291 X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa besarnya konstanta adalah -0,449. hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel lainnya konstan maka besarnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah -0,449. Hasil analisis regresi juga menunjukan nilai sig. F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada nilai level off signifikan (α) sebesar 0,05. hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan semua variable independennya. Tetapi dari hasil regresi linear berganda ini juga terlihat nilai koefisien B lebih kecil dari std. error maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Informasi teknologi (X_2) tidak berpengaruh terhadap AKIP yang mana terdapat jumlah sebesar -0,013, tetapi pada variabel independen lainnya angka koefisiennya lebih besar dari std. error maka variabel ini terdapat pengaruh yang signifikan.

Nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukan besarnya persentasi pengaruh semua variable independen terhadap

variable dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dapat menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 68,3%, sedangkan sisanya 31,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang menggunakan seperti kompetensi SDM yang tersedia, sarana dan prasarana, komitmen pegawai, kondisi keuangan satuan kerja dan lain sebagainya.

a. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap AKIP

H_a : akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap AKIP

Pedoman untuk menolak atau menerima hipotesis jika hipotesis alternatif yang diusulkan (H_a) :

a. H_a diterima jika $p \text{ value} < \text{level of signifikan} (\alpha)$

b. H_a ditolak jika $p \text{ value} > \text{level of signifikan} (\alpha)$

Dari tabel IV.10 dapat dilihat variabel penerapan akuntabilitas keuangan memiliki nilai $p\text{-value } 0,002 < 0,05$ artinya signifikan. Signifikan disini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Koefisien regresi untuk penerapan akuntabilitas keuangan yaitu sebesar 0,608 dan bertanda

positif. Tanda positif pada koefisien regresi ini menunjukkan hubungan yang searah antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini berarti apabila faktor lain konstan, maka penambahan 1 point variabel proporsi Penerapan Akuntabilitas Keuangan akan menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,608. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hal ini sesuai dengan prinsip LAKIP sendiri berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah haruslah jujur, objektif, transparan terhadap keuangan dan akurat. Tetap sesuai dengan pendapat Solihin (2007) dimana ketika Pemerintah dapat melaporkan kinerjanya baik itu keuangan secara akuntabel, maka akan berdampak pada pertanggung jawaban kinerjanya yang dilaporkan dalam LAKIP.

Hasil ini juga sama dengan yang diteliti oleh Janah (2008) dimana penerapan akuntabilitas terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Begitu juga dengan Garnita (2008) yang menyimpulkan akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di Jawa Barat.

b. Pengaruh Pemanfaatan Informasi Teknologi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap AKIP

H_a : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap AKIP

Pedoman untuk menolak atau menerima hipotesis jika hipotesis alternatif yang di usulkan (H_a) :

- a. H_a diterima jika $p \text{ value} < \text{level of signifikan} (\alpha)$
- b. H_a ditolak jika $p \text{ value} > \text{level of signifikan} (\alpha)$

Dari tabel IV.10 dapat dilihat variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi memiliki nilai $p \text{ -value } 0,696 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pemanfaatan Informasi Teknologi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Koefisien regresi untuk Penerapan Akuntabilitas Keuangan yaitu sebesar -0,013 dan bertanda negatif. Tanda negatif pada koefisien regresi ini menunjukkan hubungan yang berlawanan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, karena tidak berpengaruh tidak berarti apa-apa jika variabel lainpun konstan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen Pemanfaatan Informasi Teknologi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ini berlawanan dengan pendapat Chin dan Todd (1995) dalam Rahadi (2007) yang menyatakan salah satu manfaat teknologi informasi adalah mengembangkan kinerja perusahaan. Namun hal ini tidak dapat diterima, karena dari hasil pengumpulan kuisioner dan wawancara dengan pejabat satuan kerja perangkat daerah, ternyata pemanfaatan teknologi informasi belumlah maksimal. Terbukti hanya sedikit satuan kerja yang memiliki bagian tersendiri dalam pengembangan informasi teknologi. Mereka juga mengeluhkan SDM yang berkompeten dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan terbatasnya dana dalam pengembangan Teknologi Informasi itu sendiri (Pendapat beberapa SKPD setelah dilakukan wawancara). Sehingga ini menjadi hambatan tersendiri bagi SKPD di Kota Pekanbaru.

Padahal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indiasari dan Ertambang (2007) yang menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan di Kota Palembang, dimana nilai informasi pelaporan keuangan merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hanya Novita (2008) yang mendapat hasil sama dan mendukung penelitian ini, dimana menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja individual akuntan intern pada beberapa Bank di Pekanbaru.

c. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap AKIP

H_a : Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap AKIP

Pedoman untuk menolak atau menerima hipotesis jika hipotesis yang diusulkan (H_a) :

- a. H_a diterima jika $p \text{ value} < \text{level of signifikan} (\alpha)$
- b. H_a ditolak jika $p \text{ value} > \text{level of signifikan} (\alpha)$

Dari tabel 4.10 dapat dilihat variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan memiliki nilai $p\text{-value } 0,020 < 0,05$ artinya signifikan. Signifikan disini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Koefisien regresi untuk ketaatan terhadap peraturan perundangan yaitu sebesar 0,291 dan bertanda positif. Tanda positif pada koefisien regresi ini menunjukkan hubungan searah antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini berarti faktor lain yang konstan, maka pertambahan 1 point variabel proporsi Ketaatan pada Peraturan Perundangan akan menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,291. hasil

penelitian ini memperlihatkan bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan AKIP Kota Pekanbaru.

Hasil ini sesuai dengan teori berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga Administrasi Negara, dimana pada point kedua dikatakan bahwa pelaksanaan AKIP harus berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sendiri merupakan bagian dari peraturan perundangan yang harus ditaati. Solihin (2007) mengemukakan untuk pelaksanaan Penerapan Akuntabilitas sendiri haruslah didukung peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan.

Ini juga sama dengan hasil penelitian Jannah (2008) yang meneliti Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Budaya Organisasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Sodikin (2004) yang meneliti tentang *accountability reporting in Indonesia* juga menyimpulkan bahwa adanya tekanan dari pihak ketiga, yaitu Pemerintah dan peraturan yang dibuatnya dalam meningkatkan kinerja.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel Independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel Dependennya. Dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, biasanya digunakan Adjusted R Square. Berikut penjelasannya pada tabel IV.12 mengenai koefisien Determinasi.

Tabel IV.12 Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.683	.655	1.91492

a. Predictors: (Constant), KPPU, IT, AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data Olahan Output SPSS Versi 16.0 (2010)

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan dapat menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 68,3%, sedangkan sisanya 31,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Berarti, variabel independen yang digunakan telah sesuai karena dapat menjelaskan lebih dari 50% variabel dependennya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil suatu kesimpulan. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan oleh ke tiga variabel independent (Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan) sebesar R Square = 0,683 atau 68,3%. Maka, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian validitas data terhadap variabel independent terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid. Pada variabel Akuntabilitas Keuangan (X₁) terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid, pada variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi (X₂) terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid dan pada variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X₃) terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid, sehingga semua pertanyaan yang tidak valid dikeluarkan dalam pengolahan data selanjutnya. Sedangkan pada variabel Penerapan Akuntailitas Keuangan (AKIP) terdapat 1 pertanyaaan yang tidak valid.
2. Hasil pengujian Reabilitas menunjukkan semua pernyataan dinyatakan reliable karena nilai alpha semua komponen variabel lebih besar dari 60% (Ghozali,2001).

3. Hasil pengujian Normalitas juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
4. Variabel penerapan akuntabilitas keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini didasarkan dengan uji statistic regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,002 atau 0,2 %, yang berarti dibawah 0,05 atau 5%.
5. Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini didasarkan dengan uji statistic regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,696 atau 69,6 %. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) dinyatakan ditolak.
6. Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini didasarkan dengan uji statistic regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,020 atau 2 %.

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner setiap variabel masih menggunakan kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, sehingga rentan terjadi kekeliruan dalam pengukuran karena mungkin ada sebagian

pernyataan yang tidak menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.

2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian satuan kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh.
3. Waktu penelitian yang cukup singkat, hanya sekitar lebih kurang satu setengah bulan, yaitu April – Mei 2010, sehingga belum mewakili lamanya waktu kerja yaitu 12 bulan selama tahun 2010.
4. Pada penelitian ini hanya melihat variabel penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut.

C. Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Kuesioner setiap variabel sebaiknya menggunakan kuesioner baru yang sesuai dengan keadaan ataupun gambaran keadaan suatu daerah, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan Pet Analisis.
1. Objek penelitian sebaiknya dapat diperluas, misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah secara menyeluruh.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independent yang memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Misalnya variabel Kompetensi SDM yang ada, Sarana dan Prasarana, Komitmen Pegawai, Kondisi Keuangan Satuan Kerja dan lai-lain.
3. Setiap satuan kerja seharusnya memiliki bagian ataupun SDM yang berkompeten dalam Pemanfaatan Informasi Teknologi, karena beerapa hasil wawancara, kebanyakan para pegawai instansi bersangkutan mengeluhkan variabel tersebut. Padahal, dari beberapa penelitian terdahulu, Pemanfaatan Informasi Teknologi Berpengaruh terhadap kinerja.

BIOGRAFI PENULIS



SUTRISNO, Lahir pada hari Senin Tanggal 05 September 1986 di Desa Batu Sawar, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penulis adalah anak ke Enam dari Sembilan bersaudara, ayah bernama Ilyasdas dan ibu bernama Jusmaniar. Kedua orang tua adalah petani, oleh karena itu penulis dibesarkan di lingkungan petani di dusun tersebut.

Adapun latar belakang Pendidikan Penulis yaitu Tahun 1999 tamat dari SD Negeri 004 Batu Sawar kemudian melanjutkan ke MTS Nurul Falah Air Molek, tamat Tahun 2002 setelah itu melanjutkan ke SMA N 01 Air Molek tamat Tahun 2005 kemudian Tahun 2006 melanjutkan kuliah di UIN SUSKA Riau Pekanbaru selama kurun waktu Empat Tahun, sehingga pada Tanggal 17 Juni Tahun 2010 berhasil menyelesaikan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Pekanbaru pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Prodi Sarjana Satu (S1).

Selama menjalani Kuliah, Penulis tinggal di beberapa Masjid dan Mushalla di Pekanbaru. Dalam hidup penulis merasakan bahwa *"Hidup ini bagaikan air yang mengalir, segala sesuatu pasti bisa terjadi dan tercapai jika itu sudah kehendak Allah swt, namun kita harus tetap selalu Berdo'a, Berusaha dan Berharap agar dimasa yang akan datang hidup kita bisa jadi lebih Baik dan Sukses"*. Karena Allah swt akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan usaha kita sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang berfikir harus selalu bersyukur atas segala Nikmat dari-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sector Public Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta
- BPKP, Modul Diklat *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi 5, 2007 ; Jjakarta
- Garnita, Nita. 2008. *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi Universitas Widyatama ; Bandung
- Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Managemen*, Edisi Pertama. Bpfe ; Yogyakarta
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Kepmen RI Nomor; 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kurniawan, Teguh. 2009. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Public Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan*. Paper
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Modul Sosialisasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Cetakan Ketiga, 2001.
- lembaga Administrasi Negara (LAN), 2001, “*Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*”, Jakarta
- Mahmudi. 2005. *Analisis Laporan Keuangan Daerrah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Social, Dan Politik*. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2001, ‘*Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Sekolahtinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus.
- Mardiasmo. 2006, *Perwujudantransparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui Akuntansi Sector Public*. Jurnal Akuntansi Pemerintah

- Nahartyo, Ertambang & Desi Indriasari. 2007. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Politeknik Negeri Sriwijaya: Palembang
- Novita, Vina. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Factor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi System Informasi, Yang Baru Terhadap Kinerja Akuntan*. Skripsi, Universitas Riau: Pekanbaru
- Riandi Putra. 2007. *Penelitian Factor-Faktor Penghambat Implementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur*. Jurnal BPKP Kaltim.
- Jannah, Miftahul. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Budaya Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar*, Skripsi, Universitas Riau
- Solihin, Dadang. 2007. *Seminar Penerapan Good Governance Di Sector Public Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Public*, Bimtek Dan Orientasi Nasional Penguatan Kedudukan/Fungsi DPRD Dam Pemda Pada Pelaksanaan System Pengawasan, Budgeting Dan Legislasi Berbasis Kinerja Hotel Jayakarta-Legian, 26 April 2007
- Solikin, 2004. *Accountability In Indonesia: Perceived Performance, Measurement System And Implement Approach*. Hiroshima University
- Sugianto, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung ; Alfabeta
- Supriyono, Bambang, 2002. *Responsivitas Dan Akuntabilitas Sector Public*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
- Arikonto, 1998. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi*, Edisi Pertama. Bpfe ; Yogyakarta.
- Wardani, Diah Kusuma. 2008. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Indonesia ; Yogyakarta

Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pada Kinerja Individual Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tabanan. Jurnal. *Universitas Udayana*;Bali

www.dekominfo.com,mei 2009

www.pekanbaru.go.id.Februari 2010

www.riauterkini.com. Selasa 23 februari 2010.

www.ilmiahilmu.blogspotcom. februari 2010

www.kompas.com, januari 2010

Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arianto, Zul. 2003. *Hubungan Tindakan Suvervisi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior*, Skripsi. Universitas Padjajaran ; Bandung

Santoso, Singgih. 2007. *Menguasai Statistic Di Era Revormasi Dengan SPSS 15*, Pt. Elex Media Komputindo; Jakarta

Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.total
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	75
5	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4	63
4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	82
4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	2	4	2	2	2	3	4	1	3	61
3	4	5	3	4	4	3	3	3	2	4	4	4	2	2	3	4	3	4	64
4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	68
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	3	4	4	2	69
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	78
3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	62
3	3	3	3	3	4	4	2	2	4	3	3	2	2	2	3	3	4	3	56
4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4	68
4	3	4	2	2	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67
4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	2	4	2	3	2	4	3	4	3	61
5	5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	4	63
2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1	33
3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	52
4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	4	2	2	57
4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	1	3	3	3	3	4	4	63
2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	44
4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	66
3	4	5	3	4	4	3	3	3	2	4	4	4	2	2	3	4	3	4	64
2	4	3	4	5	3	3	4	3	3	4	4	3	5	4	5	5	5	3	72
2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	3	3	4	4	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	75
5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	2	4	3	4	3	2	3	2	4	65
4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	3	2	2	2	2	4	60
4	4	3	3	3	3	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2	5	5	5	73
4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	2	4	2	2	4	3	3	63
3	3	2	2	4	2	3	4	3	1	1	4	2	2	2	3	4	2	3	50
4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	82
4	3	3	4	4	3	3	4	4	1	1	4	1	2	2	3	4	3	2	55
4	4	3	3	3	3	3	4	4	2	1	4	1	1	1	3	4	3	2	53
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	3	4	4	2	69
4	4	5	4	4	3	3	4	4	3	2	4	2	2	2	3	4	1	3	61
4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	71
3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	3	3	2	3	3	4	2	2	3	50
4	5	5	4	4	4	4	5	4	3	3	4	2	2	4	4	3	3	3	70
4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	3	4	1	2	3	3	3	3	3	65

2. Korelasi Variabel Pemanfaatan Informasi Teknologi (X2)

Correlations

		PIT1	PIT2	PIT3	PIT4	PIT5	PIT6	PIT7	PIT8	PIT9	PIT10	PIT11	PIT12	PIT13	PIT14	PIT15	PIT16	PIT17	PIT18	PIT19	PIT
PIT1	Pearson Correlation	1	.697**	.567**	.457**	.295	.491**	.472**	.405	.541**	.437**	.160	.320	.051	-.006	-.195	-.296	.114	.052	.329	.506**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.004	.072	.002	.003	.012	.000	.006	.338	.050	.763	.973	.240	.071	.494	.755	.044	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT2	Pearson Correlation	.697**	1	.721**	.568**	.721**	.633**	.491**	.587**	.467**	.410	.351	.517**	.179	.082	-.077	.077	.378	.299	.391	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.003	.010	.031	.001	.283	.626	.645	.646	.019	.068	.015	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT3	Pearson Correlation	.567**	.721**	1	.660**	.494**	.552**	.326	.377	.362	.383	.435**	.424**	.297	-.084	-.127	.114	.286	.034	.258	.614**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000	.046	.020	.026	.017	.006	.008	.070	.617	.447	.496	.082	.839	.118	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT4	Pearson Correlation	.457**	.568**	.660**	1	.605**	.417**	.425**	.537**	.607**	.499**	.262	.483**	.180	-.019	-.059	.178	.398	.137	-.027	.626**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.000	.009	.008	.001	.000	.001	.112	.002	.280	.910	.725	.285	.013	.411	.872	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT5	Pearson Correlation	.295	.721**	.494	.605**	1	.446**	.342	.558**	.379	.277	.285	.461**	.204	.121	.093	.234	.558**	.262	.139	.644**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000	.002	.000		.005	.036	.000	.019	.092	.083	.004	.219	.468	.579	.157	.000	.112	.405	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT6	Pearson Correlation	.491**	.633**	.552**	.417**	.446**	1	.707**	.378	.400	.612**	.678**	.412	.409	.191	.181	.209	.275	.490**	.573**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.009	.005		.000	.019	.013	.000	.000	.010	.011	.250	.278	.207	.095	.002	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT7	Pearson Correlation	.472**	.491**	.326	.425**	.342	.707**	1	.576**	.484**	.703**	.559**	.488**	.356	.264	.241	.121	.378	.404	.483**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.003	.002	.046	.008	.036	.000		.000	.002	.000	.000	.002	.028	.110	.145	.471	.019	.012	.002	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT8	Pearson Correlation	.405	.587**	.377	.537**	.558**	.378	.576**	1	.690**	.229	.155	.538**	.000	.000	-.030	.198	.399	.175	.262	.594**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.020	.001	.000	.019	.000		.000	.167	.353	.001	1.000	1.000	.859	.233	.013	.293	.112	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT9	Pearson Correlation	.541**	.467**	.362	.607**	.379	.400	.484**	.690**	1	.477**	.187	.576**	.155	.092	-.105	-.051	.447**	.113	.328	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.026	.000	.019	.013	.002	.000		.002	.261	.000	.354	.583	.530	.762	.005	.498	.044	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT10	Pearson Correlation	.437**	.410	.383	.499**	.277	.612**	.703**	.229	.477**	1	.585**	.298	.526**	.346	.268	.040	.359	.459**	.440**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.006	.010	.017	.001	.092	.000	.000	.167	.002		.000	.070	.001	.033	.104	.813	.027	.004	.006	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

PIT11 Pearson Correlation	.160	.351*	.435*	.262	.285	.678**	.559**	.155	.187	.585**	1	.171	.667**	.424**	.287	.144	.331*	.527**	.518**	.701**
Sig. (2-tailed)	.338	.031	.006	.112	.083	.000	.000	.353	.261	.000		.306	.000	.008	.081	.388	.042	.001	.001	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT12 Pearson Correlation	.320	.517**	.424*	.483**	.461**	.412*	.488**	.538**	.576**	.298	.171	1	.197	.175	-.153	.263	.459**	.059	.224	.581**
Sig. (2-tailed)	.050	.001	.008	.002	.004	.010	.002	.001	.000	.070	.306		.235	.294	.358	.110	.004	.724	.177	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT13 Pearson Correlation	.051	.179	.297	.180	.204	.409*	.356*	.000	.155	.526**	.667**	.197	1	.350*	.220	.173	.475**	.440**	.424**	.575**
Sig. (2-tailed)	.763	.283	.070	.280	.219	.011	.028	1.000	.354	.001	.000	.235		.031	.184	.300	.003	.006	.008	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT14 Pearson Correlation	-.006	.082	-.084	-.019	.121	.191	.264	.000	.092	.346*	.424*	.175	.350*	1	.615**	.341*	.257	.306	.489**	.454**
Sig. (2-tailed)	.973	.626	.617	.910	.468	.250	.110	1.000	.583	.033	.008	.294	.031		.000	.036	.119	.062	.002	.004
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT15 Pearson Correlation	-.195	-.077	-.127	-.059	.093	.181	.241	-.030	-.105	.268	.287	-.153	.220	.615**	1	.449**	.124	.254	.364*	.317
Sig. (2-tailed)	.240	.645	.447	.725	.579	.278	.145	.859	.530	.104	.081	.358	.184	.000		.005	.459	.124	.025	.052
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT16 Pearson Correlation	-.296	.077	.114	.178	.234	.209	.121	.198	-.051	.040	.144	.263	.173	.341*	.449**	1	.343*	.237	.006	.325*
Sig. (2-tailed)	.071	.646	.496	.285	.157	.207	.471	.233	.762	.813	.388	.110	.300	.036	.005		.035	.153	.974	.047
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT17 Pearson Correlation	.114	.378*	.286	.398*	.558**	.275	.378*	.399*	.447**	.359*	.331*	.459**	.475**	.257	.124	.343*	1	.351*	.232	.620**
Sig. (2-tailed)	.494	.019	.082	.013	.000	.095	.019	.013	.005	.027	.042	.004	.003	.119	.459	.035		.030	.161	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT18 Pearson Correlation	.052	.299	.034	.137	.262	.490**	.404*	.175	.113	.459**	.527**	.059	.440**	.306	.254	.237	.351*	1	.392*	.543**
Sig. (2-tailed)	.755	.068	.839	.411	.112	.002	.012	.293	.498	.004	.001	.724	.006	.062	.124	.153	.030		.015	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT19 Pearson Correlation	.329*	.391*	.258	-.027	.139	.573**	.483**	.262	.328*	.440**	.518**	.224	.424**	.489**	.364*	.006	.232	.392*	1	.616**
Sig. (2-tailed)	.044	.015	.118	.872	.405	.000	.002	.112	.044	.006	.001	.177	.008	.002	.025	.974	.161	.015		.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
PIT Pearson Correlation	.506**	.734**	.614*	.626**	.644**	.796**	.770**	.594**	.611**	.744**	.701**	.581**	.575**	.454**	.317	.325*	.620**	.543**	.616**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.052	.047	.000	.000	.000	
N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Korelasi Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)

Correlations

[illegible]

KPPU10	Pearson Correlation	.407*	.469**	-.037	.303	.257	.387*	.250	.257	.285	1	.330*	.535**
	Sig. (2-tailed)	.011	.003	.827	.064	.120	.016	.130	.120	.083		.043	.001
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
KPPU11	Pearson Correlation	.381*	.022	.039	.485**	.389*	.501**	.311	.529**	.455**	.330*	1	.624**
	Sig. (2-tailed)	.018	.898	.815	.002	.016	.001	.057	.001	.004	.043		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
KPPU	Pearson Correlation	.670**	.575**	.344*	.830**	.803**	.742**	.587**	.729**	.742**	.535**	.624**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.034	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Korelasi Variabel AKIP (Y)

Correlations

		AKIP1	AKIP2	AKIP3	AKIP4	AKIP5	AKIP6	AKIP7	AKIP
AKIP1	Pearson Correlation	1	.557**	.224	.858**	.384*	.408*	.465**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.000	.176	.000	.017	.011	.003	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP2	Pearson Correlation	.557**	1	.232	.672**	.255	.371*	.558**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000		.162	.000	.122	.022	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP3	Pearson Correlation	.224	.232	1	.317	-.039	.213	.145	.451**
	Sig. (2-tailed)	.176	.162		.052	.818	.199	.385	.005
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP4	Pearson Correlation	.858**	.672**	.317	1	.306	.553**	.623**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.052		.061	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP5	Pearson Correlation	.384*	.255	-.039	.306	1	.411*	.288	.574**
	Sig. (2-tailed)	.017	.122	.818	.061		.010	.080	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP6	Pearson Correlation	.408*	.371*	.213	.553**	.411*	1	.411*	.714**
	Sig. (2-tailed)	.011	.022	.199	.000	.010		.010	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP7	Pearson Correlation	.465**	.558**	.145	.623**	.288	.411*	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.385	.000	.080	.010		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
AKIP	Pearson Correlation	.784**	.723**	.451**	.873**	.574**	.714**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN

REKAPITULASI KUESIONER VARIABEL

1. Variabel Akuntabilitas Keuangan (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1. Total
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	4	5	29
5	4	5	4	5	4	27
5	4	5	5	4	4	27
4	5	4	4	3	3	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	4	5	27
4	5	4	5	5	4	27
5	4	5	5	4	4	27
4	5	4	4	3	3	23
5	5	5	5	4	4	28
5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	4	5	29
5	4	5	4	4	5	27
5	4	5	4	5	5	28
5	5	5	5	4	4	28
5	4	5	5	5	5	29
3	4	5	5	5	4	26
5	4	5	5	4	4	27
5	5	4	4	5	4	27
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	2	2	20
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	23
5	5	4	4	3	4	25
5	5	5	5	4	5	29
5	4	5	5	4	4	27
5	4	4	4	3	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	5	4	27
5	5	5	5	4	4	28
3	3	4	3	2	2	17
4	5	5	4	4	5	27
5	5	5	5	3	3	26

**LAMPIRAN CORRELATION VARIABEL X1 ADA
DIBAWAH INI.....**

REKAPITULASI KUESIONER VARIABEL

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	Xtotal
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	52
5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	52
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	4	4	4	5	3	4	5	4	48
4	4	5	3	4	3	4	4	3	4	4	42
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	54
5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	49
5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	47
4	4	5	3	4	3	4	4	3	4	4	42
5	5	5	5	5	4	4	3	5	5	4	50
5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	48
5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	52
5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	52
5	3	4	4	4	4	5	4	3	5	5	46
4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	47
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	51
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
5	5	5	4	4	4	5	3	4	5	4	48
5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	50
5	3	5	4	4	5	4	3	5	4	5	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	4	5	5	5	4	5	4	5	3	5	50
5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	50
5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	52
5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	51
5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
4	4	5	3	3	4	4	3	3	4	4	41
5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	53
4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	46

3. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)

REKAPITULASI KUESIONER VARIABEL

4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Ytotal
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	4	4	5	33
4	4	4	4	5	5	4	30
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	5	4	4	5	5	31
4	4	4	4	3	3	4	26
5	5	2	5	5	5	5	32
5	5	5	5	5	4	5	34
4	4	5	4	5	4	5	31
4	5	4	4	5	5	5	32
4	4	4	4	3	3	4	26
5	5	5	5	5	4	5	34
4	5	4	4	5	4	5	31
5	5	5	5	4	4	5	33
5	5	5	5	4	5	4	33
4	5	4	4	4	3	4	28
4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	5	4	4	4	4	30
5	5	5	5	4	5	5	34
4	4	5	4	4	5	3	29
4	4	5	4	4	5	5	31
5	4	5	5	4	4	4	31
4	5	5	5	1	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	3	3	3	3	23
5	5	5	5	4	5	5	34
4	3	3	3	3	3	3	22
4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	4	5	5	4	30
5	4	4	4	4	4	4	29
4	4	4	4	4	3	4	27
5	5	2	5	5	5	5	32
5	5	5	5	5	5	4	34
4	4	4	5	5	5	5	32
3	4	4	3	4	4	3	25
5	4	5	5	5	5	4	33
4	4	4	4	4	4	5	29

Korelasi Variabel X1

Correlations

	Akt. Keu 1	Akt. Keu 2	Akt. Keu 3	Akt. Keu 4	Akt. Keu 5	Akt. Keu 6	Akt. Keu
Akt. Keu 1 Pearson Correlation	1	.300	.386*	.411*	.397*	.514**	.696**
Sig. (2-tailed)		.067	.017	.010	.014	.001	.000
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu 2 Pearson Correlation	.300	1	.198	.348*	.168	.234	.492**
Sig. (2-tailed)	.067		.233	.032	.312	.157	.002
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu 3 Pearson Correlation	.386*	.198	1	.533**	.415**	.313	.628**
Sig. (2-tailed)	.017	.233		.001	.010	.056	.000
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu 4 Pearson Correlation	.411*	.348*	.533**	1	.500**	.395*	.726**
Sig. (2-tailed)	.010	.032	.001		.001	.014	.000
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu 5 Pearson Correlation	.397*	.168	.415**	.500**	1	.716**	.818**
Sig. (2-tailed)	.014	.312	.010	.001		.000	.000
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu 6 Pearson Correlation	.514**	.234	.313	.395*	.716**	1	.812**
Sig. (2-tailed)	.001	.157	.056	.014	.000		.000
N	38	38	38	38	38	38	38
Akt. Keu Pearson Correlation	.696**	.492**	.628**	.726**	.818**	.812**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000	.000	
N	38	38	38	38	38	38	38

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
AKIP	30.4474	3.26072	38
AKUNTABILITAS	26.7368	2.75764	38
IT	63.2632	10.07454	38
KPPU	49.9474	4.17164	38

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268.720	3	89.573	24.427	.000 ^a
	Residual	124.675	34	3.667		
	Total	393.395	37			

a. Predictors: (Constant), KPPU, IT, AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: AKIP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.449	3.928		.114	.910		
	AKUNTABILITAS	.608	.182	.515	3.345	.002	.394	2.539
	IT	-.013	.033	-.040	-.394	.696	.920	1.087
	KPPU	.291	.119	.373	2.438	.020	.399	2.505

a. Dependent Variable: AKIP

Reliability

Scale: All Variables Akuntabilitas Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	6

Reliability

Scale: All Variables Pemanfaatan IT

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	19

Reliability

Scale: All Variables Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.867	11

Reliability

Scale: All Variables AKIP

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	7

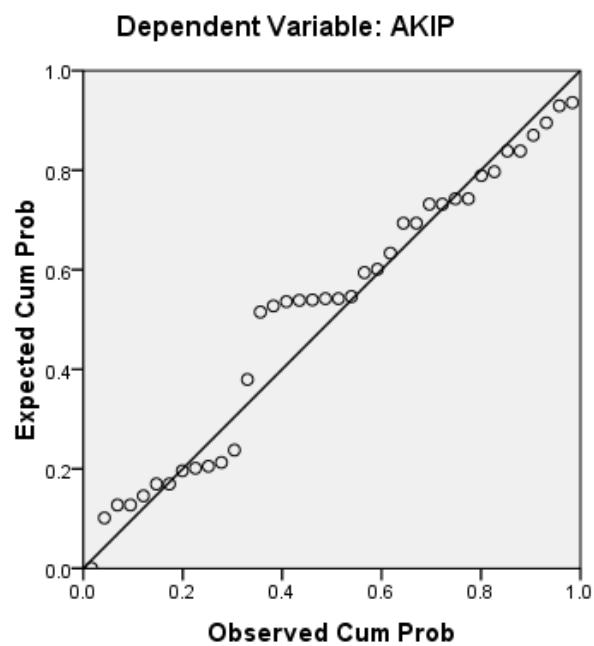
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826 ^a	.683	.655	1.91492	1.493

a. Predictors: (Constant), KPPU, IT, AKUNTABILITAS

b. Dependent Variable: AKIP

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: AKIP

